



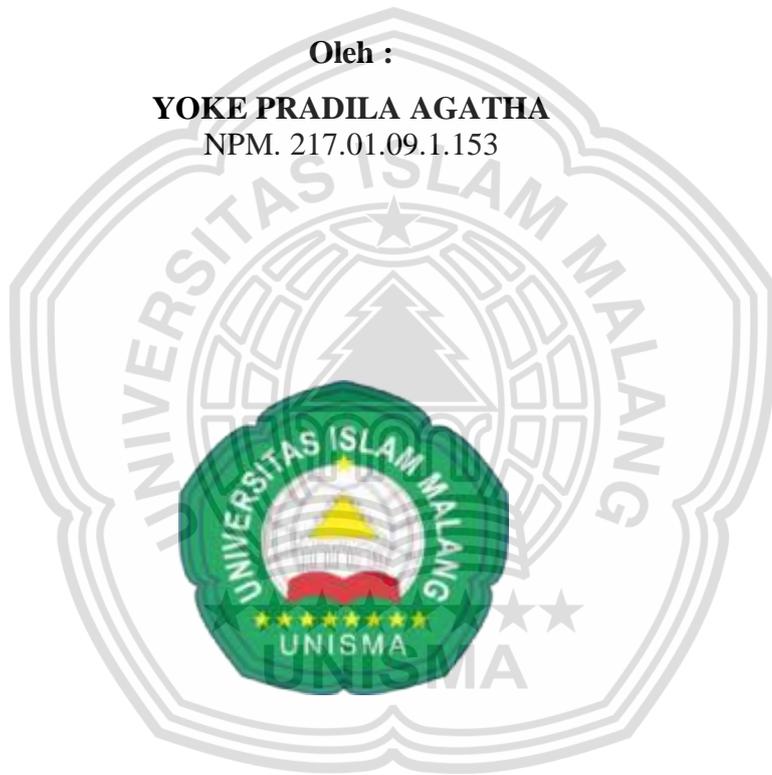
**UPAYA DINAS SOSIAL KOTA BATU DALAM PEMBERDAYAAN
WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN JUNREJO
KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

YOKE PRADILA AGATHA
NPM. 217.01.09.1.153



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRSI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022

RINGKASAN

Yoke Pradila, 2021, Upaya Dinas Sosial Kota Batu Dalam Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Junrejo Kota Batu, Prof. Dr. YaqubCikusin, M.SiDosenPembimbing I, Dr. Hayat, S.AP., M.SiDosenPembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam Menurunkan Masalah Kesejahteraan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (2) mengetahui Dampak dari Upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam Menurunkan Masalah Kesejahteraan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan, pengumpulan data yang akan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan untuk mengecek keabsahan data, Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasilpenelitianmenunjukkanbahwaupaya dinas sosial Kota Batu dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi, program yang dilakukanpemberianpelatihanketerampilanmenjahit, memasak, dan membuat. Upayapemberdayaanwanitadalammengembangkanpotensisehinggadapatmeningkatkanperekonomiankeluarga. Faktorpenghambatdalamkegiatanpemberdayaan ini yaitu masih banyaknya WRSE yang berpendapat bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan masih belum membantu mereka dalam mengentaskan perekonomiannya.

Kata Kunci : Upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi

SUMMARY

Yoke Pradila, 2021, Efforts of the Batu City Social Service in Empowering Socio-Economic Vulnerable Women in Junrejo District, Batu City, Prof. Dr. YaqubCikusin, M.Si Advisor I, Dr. Hayat, S.AP., M.Si Advisor II.

This study aims to (1) determine the efforts of the Batu City Social Service in Reducing the Welfare Problems of Socio-Economic Vulnerable Women.

This research uses descriptive research method with a qualitative approach. Qualitative descriptive research method is the research method used to describe events that occur in the field, data collection will be carried out by interview, observation, and documentation techniques. Researchers use trust to check the validity of the data. Data analysis in this study uses three components, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the results of the study indicate that the efforts of the Batu City social service in empowering socio-economic vulnerable women, the program carried out is providing training in sewing, cooking, and batik skills. Efforts to empower women in developing their potential so that they can improve the family economy. The inhibiting factor in this empowerment activity is that there are still many WRSE who think that the training activities provided have not helped them in alleviating their economy.

Keywords: Social Service Efforts, Empowerment, Socio-Economic Vulnerable Women

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia adalah amanat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan telah digariskan di dalam GBHN, hal ini digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan merupakan upaya yang mencakup pembangunan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan dapat pula pembangunan ideologi. Pembangunan nasional adalah proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hayat (2019:71) mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kontribusi penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya guna mencapai kehidupan yang bermartabat dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Jum Anggriani (2012:41) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan dari negara kesejahteraan, diperlukan pemerintahan yang baik, untuk itu diperlukan legalitas dalam setiap tindakan-tindakan yang dijalankan.

Di Indonesia proses pembangunan dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan suatu masyarakat. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi mikro yaitu individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi pada era baru berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Model *socio-economic development* memberikan jawaban terhadap pertimbangan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan.

Implikasi dari model pembangunan ini adalah dengan adanya hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi dan sosial berupa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan berkesinambungan, berkurangnya angka pengangguran, berkurangnya dampak negatif di bidang kesehatan sebagai akibat kemiskinan dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam menikmati hasil pembangunan. Hayat (2018:22-23) mengatakan bahwa negara harus tahu apa yang menjadi masalah dimasyarakat dan menetapkan solusi. Grand desain pada pembangunan sistem otonomi daerah mulai mengedepankan sektor masyarakat dalam peningkatan *human dignity*, bahkan mulai digunakan perspektif pembangunan yang berorientasi kerakyatan. Dalam perspektif tersebut, harkat dan kapasitas manusia serta kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan semakin mendapatkan pengakuan. Proporsi peran masyarakat semakin besar dan sebaliknya peran pemerintah semakin kecil.

Pengakuan harkat dan kapasitas manusia diharapkan pada tingkat masyarakat dapat didorong iklim yang semakin kondusif bagi masyarakat lapisan bawah untuk memanfaatkan peluang yang muncul serta pada tingkat yang lebih luas dapat ditingkatkan posisi tawar masyarakat lokal terhadap masyarakat umum dan juga terhadap negara. Hal ini dapat dibuktikan oleh daerah yang menunjukkan tingkat kemampuannya melaksanakan otonomi daerah dengan pembangunan yang berbasis pada

potensi wilayah dan masyarakat lokalnya. Harapan tersebut dapat dibuktikan pada pemerintahan yang mampu mengidentifikasi segala peluang wilayah maupun kapasitas kemampuan dari penduduknya untuk disatukan dalam formulasi pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Pembangunan memang menjadi faktor utama yang harus dilaksanakan, karena dengan pembangunan baik pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia maka suatu negara dapat menjadi negara maju.

Pembangunan daerah harus mengarah pada lahirnya partisipasi dan penguatan aspek yang ada di dalam masyarakat, sehingga pembangunan daerah merupakan inisiatif dan aspirasi masyarakat tersebut. Dalam pandangan ini keterlibatan masyarakat akan tercipta bukan karena mobilitas tetapi sebagai bentuk partisipasi. Dalam model pendekatan yang demikian dikenal dengan pendekatan proses dimana manusia sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dalam pembangunan. Selain itu, partisipasi dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen, karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan atau perumusannya. Hal tersebut membuat masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut sehingga melahirkan rasa tanggung jawab bagi keberhasilan pembangunan. Geografi pembangunan merupakan cabang ilmu geografi yang mengacu pada standar hidup dan kualitas hidup manusia.

Dalam studi ini pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang mungkin melibatkan peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan seperti yang dirasakan oleh masyarakat yang mengalami perubahan. Hayat (2014:226) mengatakan bahwa kualitas sumberdaya aparatur berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki berdampak pada kinerja yang dilakukan. Berbagai tantangan masih terus dihadapi ekonomi

bangsa. Restrukturisasi sebagai bahan evaluasi dan pembangunan terhadap berbagai infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin, Berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui program-program bantuan sosial.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan ekonomi mikro dan kecil lokal yang ada dalam masyarakat agar komunitas ekonomi mikro tersebut mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan hal ini upaya pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap-perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang menghinggapinya. Meskipun meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dihadapkan pada beban yang berat dengan masih besarnya jumlah penduduk miskin dan rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Kompleksitas penanganan sumber daya manusia juga semakin meningkat dengan persebaran pendudukan yang tidak merata terutama daerah perkotaan.

Setiap proses menentukan hasil kebijakan. Kebijakan ditentukan oleh prosesnya. Proseslah yang menjadi garing penting dalam pencapaian tujuan kebijakan. Proses berada diantara formulasi kebijakan dengan tujuan kebijakan. Proses merupakan sirkulasi yang mengaktualisasikan aspek kebijakan ke dalam semua komponen kebijakan untuk menghasilkan keluaran kebijakan. Kebijakan tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan ditopang oleh kebijakan yang lain yang saling

bersentuhan sebagai bagian dari sebuah kebijakan makro. Kebijakan membutuhkan jaringan (networking) yang dapat mengomunikasikan antara kebijakan yang satu dengan yang lain, sehingga keterkaitan terhadap program yang satu dengan program yang lainnya dapat berkesinambungan jaringan dalam sebuah kebijakan sebagai bentuk kolaborasi efektif membangun tujuan kebijakan secara nasional maupun internasional.

Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keniscayaan dalam kebijakan publik. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membangun pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu melalui peran aktif dalam berbagai program pemerintah maupun mendukung secara langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Reformasi birokrasi secara signifikan akan berpengaruh terhadap aspek pelayanan publik. Implementasi reformasi birokrasi sudah dilakukan di setiap lembaga ataupun kementerian.

Diberlakukannya reformasi birokrasi adalah untuk melakukan penyegaran terhadap sistem pemerintahan yang ada serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai nilai partisipasi dalam program-program pemerintahan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam program kerja pemerintah merupakan bentuk dukungan terhadap pencapaian tujuan, visi maupun misi yang dibangun oleh pemerintah, sehingga tingkat keberhasilannya akan tinggi. Tidak dapat dipungkiri, pelayanan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem dan tatanan pemerintahan.

Penilaian yang baik dan profesional, tentunya akan menciptakan ekosistem reformasi birokrasi dan dapat bersinergi sebagai bagian dari pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan (Hayat, 2015:831). Oleh karena itu, agar reformasi bisa berjalan dengan baik maka harus ada

kontrol dalam pelaksanaannya. Kontrol terhadap sistem dan sumber daya manusia aparatur menjadi penting dalam reformasi birokrasi, yaitu melalui penilaian kinerja pelayanan. Sumber daya manusia masih dianggap penting dalam pelayanan publik, maka seyogyanya ada penilaian yang dicantumkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Wahab, 2005:3).

Proses manajemen dalam sebuah organisasi publik erat kaitannya dengan proses manajemen publik baik secara praktik maupun teori. Organisasi publik dikelola dengan manajemen publik karena orientasi yang dibangun secara publik service atau untuk kepentingan publik atau masyarakat. Manajemen publik mempunyai kerangka konsep yang berbeda, karena orientasinya sangat berbeda. Proses manajemen itu sendiri menurut (Safroni, 2012:34) adalah suatu siklus yang prosesnya berkualitas maka akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan berimplikasi kepada kinerja. Kinerja aparatur memiliki dampak pada output yang hasilnya lebih baik dan sesuai dengan harapan. Dari proses manajemen akan berdampak pada kinerja aparatur. Karena prinsip manajemen dilakukan oleh manajemen dan dilakukan oleh pemimpin yang ditujukan kepada aparatur dalam penyelenggaraan organisasi. Bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan kompetensi yang dimiliki seseorang, niscaya akan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Pekerjaan itu dikerjakan oleh ahlinya yang memang mempunyai bidang dalam pekerjaan itu sendiri.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, dengan wewenang dan tanggung

jawab yang melekat dalam diri masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Prinsip kinerja adalah pekerjaan yang berkesinambungan dan terus menerus yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dengan capaian sesuai apa yang diharapkan bersama. Kompetensi, mutlak harus dimiliki oleh aparatur sebagai upaya menciptakan kualitas kinerja yang profesional dan akuntabel dalam kerangka menciptakan reformasi kepegawaian yang berimplikasi kepada efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik, transparansi dan kapabilitas kebijakan publik.

Pelayanan yang berkualitas dilakukan dengan aparatur yang mempunyai kinerja yang baik dan profesional. Profesionalitas kinerja dibangun sesuai dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki aparatur. Ketika profesionalitas dibangun dalam diri aparatur pelayanan publik tentunya disertai dengan pemberian pelayanan secara optimal dan prima, maka dari situlah kinerja pelayanan publik tampak optimal. Bentuk pencapaian atas apa yang direncanakan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh individu aparatur dalam melakukan tugasnya yang merupakan wadah bagi aparatur dalam pekerjaannya yaitu dapat dikatakan sebagai kinerja. Setiap aparatur mempunyai target pencapaian kinerja yang mereka lakukan. Target pencapaian terhadap kinerja merupakan bentuk komitmen pegawai dalam meningkatkan kinerja dalam pelayanan. Target tersebut menjadi motivasi bagi aparatur dalam bekerja. Prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, kehidupan beragama, dan ketahanan budaya ditempuh melalui pembangunan bidang sumber daya manusia., kesejahteraan rakyat, agama, dan budaya serta pembangunan bidang-bidang lain yang terkait.

Hayat (2018:13) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi

dan evaluasi yang mengikutinya. Eksekusinya berada pada level implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal. Hayat (2016:2) mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai tiga komponen yang menyertainya yaitu formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ketiga aspek tersebut merupakan prasyarat kebijakan publik dalam mencapai tujuan.

Kemajuan suatu bangsa tidak dapat terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, karena SDM merupakan modal dasar dari pembangunan yang sedang / akan dilakukan. Oleh karena itu, SDM yang berkualitas merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu bangsa di dalam melakukan pembangunan. Upaya peningkatan kualitas / mutu SDM dapat dilakukan melalui berbagai macam salah satunya melalui pemberdayaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ialah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang rawan sosial ekonomi maupun masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Program bantuan sosial juga memperhatikan kelompok masyarakat penyandang disabilitas, anak dengan disabilitas, dan lansia terutama yang

berasal dari keluarga miskin, anak balita terlantar, anak terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi serta masyarakat yang terpinggirkan, agar mereka mendapatkan akses terhadap kebutuhan dan layanan dasar serta sumber daya produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di kota Batu berdasarkan hasil survei pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada pendataan tahun 2021 sebanyak 5.648 jiwa Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kondisi ini mengakibatkan ketidakstabilan kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga diperlukan lebih banyak anggaran untuk percepatan program pengentasan kemiskinan dengan berbagai kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Khususnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kota Batu berdasarkan hasil pendataan berjumlah 192 orang dan 97 orang di wilayah Kecamatan Junrejo.

Tabel 1.1 Data Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kota Batu Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Kecamatan Batu	36
2.	Kecamatan Junrejo	97
3.	Kecamatan Bumiaji	59
		192

Sumber hasil survei Dinas Sosial tahun 2021

Tabel 1.2 Data Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2021

No	Desa	Jumlah
----	------	--------

1.	Desa Beji	45
2.	Desa Dadaprejo	-
3.	Desa Junrejo	-
4.	Desa Mojorejo	3
5.	Desa Torongrejo	19
6.	Desa Pendem	30
7.	Desa Tlekung	-
		97

Sumber hasil survei Dinas Sosial tahun 2021

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang didalamnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : Pendapatan yang rendah, rendahnya akses atau kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Terkait masih adanya daerah-daerah kemiskinan yang perlu mendapat sentuhan langsung dan warga masyarakat yang berada diwilayah ini rata-rata berpenghasilan rendah dengan mata pencaharian/pekerjaan sebagian besar adalah disektor pertanian, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2021 36 pekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang sayur, pedagang bunga, pedagang makanan kecil, tukang bangunan, pengrajin dan lain-lain. Secara umum didesa pada daerah-daerah miskin mempunyai jalan setapak dengan sistem drainase yang kurang memenuhi syarat dan jalan menuju persawahan masih berupa tanah atau belum di makadam, sehingga pada saat musim hujan petani yang akan mengangkut hasil pertanian mengalami kesulitan, karena mobil tidak bisa masuk ke areal persawahan dan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengangkut hasil panen dengan tenaga manusia dan tinginya biaya operasional harga pupuk dan obat-obatan pertanian yang membumbung tinggi tanpa diimbangi harga hasil pertanian, dimana dengan

melambungnya harga kebutuhan pokok semakin besar pula pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, sedangkan penghasilan sangat minim.

Menurut Kementerian sosial, setidaknya terdapat 22 definisi operasional dan karakteristik dari masing-masing jenis PMKS. Dari ke 22 jenis PMKS tersebut, salah satu kategorinya adalah perempuan, yaitu Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). WRSE adalah wanita baik gadis maupun janda yang merupakan kepala keluarga. Harini dan Listyaningsih (2000:5) mengatakan bahwa wanita kepala rumah tangga adalah wanita yang dianggap bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, yaitu : 1) wanita yang tidak kawin yaitu wanita yang tidak terikat dengan perkawinan dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, 2) wanita kawin yaitu wanita yang terikat dalam perkawinan tetapi tempat tinggalnya terpisah dengan suami sehingga wanita tersebut mengepalai rumah tangganya, 3) wanita cerai hidup atau cerai mati dan belum menikah lagi dan tidak kembali ke keluarga yang melahirkan atau mertua. Secara lebih spesifik, menurut (Dinas Sosial, 2015) WRSE adalah seseorang wanita dewasa yang belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan ciri-ciri wanita dewasa, belum menikah (adalah wanita anak fakir miskin) atau janda (adalah wanita sebagai kepala keluarga), berusia 18 - < 60 tahun dan penghasilan tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Rumah tangga yang dikepalai oleh wanita biasanya miskin, karena pendidikannya rendah, akses terbatas terhadap pekerjaan, pelayanan sosial, sumber produksi, modal, kredit dan tanah, serta memiliki sedikit jaringan keterbatasan yang mendukungnya. Idris dan Selvaratman (2012:18) mengatakan bahwa insiden kemiskinan baik secara relatif atau absolut adalah tinggi di kalangan wanita terutama bagi wanita yang menjadi kepala rumah tangga. Bagi wanita yang bercerai hidup atau bercerai mati, mereka bisa menjadi miskin serta merta jika terpaksa menanggung anak tanpa

nafkah atau harta yang ditinggalkan. Kemiskinan di kalangan ibu tunggal antara aspek yang menjadi perhatian pihak pemerintah dalam perumusan strategi pengentasan kemiskinan, kemiskinan di kalangan ibu tunggal harus diberi perhatian, mengingat dia dapat memberi implikasi sosial apabila tidak ditangani secara efektif.

Kesejahteraan wanita wajib menjadi agenda penting dalam program pengentasan kemiskinan karena kesejahteraan wanita pada umumnya dapat mencerminkan kesejahteraan keluarga dan dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan golongan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, yaitu anak-anak, lansia, dan anggota keluarga yang menderita penyakit. Hal tersebut terkait dengan peranan reproduktif yang melekat pada kaum perempuan. Peranan reproduktif merupakan peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga contohnya : memasak, memelihara rumah, memelihara dan mengasuh anak dan anggota keluarga lainnya.

Di Indonesia, terlebih pada masyarakat pedesaan argumen tersebut dapat dipahami, karena : 1) perempuan, dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal dirumah dan memiliki banyak waktu luang, 2) perempuan lebih banyak bekerja di sektor domestik sehingga mereka lebih banyak mengetahui kebutuhan nutrisi dan kesehatan bagi keluarganya, 3) adanya kendala (*constraint*) bagi perempuan yang mengakses kredit kecil (*microfinance*) untuk usaha. Banyak laporan yang menyatakan bahwa perempuan sering menjadi market target dari rentenir (*moneylenders*), tukang gadai (*pawnbrokers*), dan penjual barang-barang kebutuhan rumah tangga.

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para WRSE. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penetapan visi sebagai kota pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu langkah alternatif dalam hal penerimaan devisa pemerintah dalam menyokong pilar-pilar perekonomian daerah. Hal ini sangat diperlukan dukungan oleh potensi wilayah yang seiring dengan konteks kepariwisataan. Masyarakat dalam peranannya sebagai penggerak pariwisata juga merupakan aset yang dimiliki suatu industri wisata, karena ekowisata merupakan pariwisata yang bersifat massal dimana dalam proses pengembangannya melibatkan peran aktif masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak tersisihkan keberadaan, budaya, karakteristik ataupun mata pencahariannya, dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengembangan ekowisata tersebut.

Langkah dalam menggapai kesejahteraan dimulai oleh Kota batu dengan melahirkan visi dan misi sebagai sentra pertanian dan Kota Pariwisata merupakan perjalanan yang teruraikan dalam sistem pemerintahan yang baru berusia 19 tahun. Langkah ini dianggap sebagai titik awal dalam memajukan Kota Batu untuk dapat menjawab tantangan dari Otonomi daerah yaitu percepatan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kota Batu merupakan kawasan daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur, terutama jenis ekowisata. Dalam pengembangan daerah wisata Kota Batu, pemerintah membentuk lingkungan binaan, menjalin kerjasama dengan investor dan berbagai strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dibuatnya. Dengan penguatan visi dan misi yang dapat diikuti oleh masyarakat menunjukkan adanya sistem yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penikmat pembangunan. Dengan keberhasilan tersebut maka Kota Batu bukan sekedar isapan jempol dalam membina, menata bahkan melakukan pembangunan kota wisata.

Mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Pemerintah Dinas Sosial Kota Batu terus menggalang kekuatan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini yakni perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, belum ada sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk terutama penduduk yang miskin dan rentan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA DINAS SOSIAL**

KOTA BATU DALAM PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam menurunkan masalah kesejahteraan wanita rawan sosial ekonomi?
2. Bagaimana dampak dari upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam menurunkan masalah kesejahteraan wanita rawan sosial ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam menurunkan masalah kesejahteraan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Mengetahui dampak dari upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam menurunkan masalah kesejahteraan wanita rawan sosial ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi pembaca :
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi bagi pekerja sosial atau lembaga sosial atau komunitas sosial yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dalam hal ini adalah ibu-ibu dalam melaksanakan program-program penanganan pemberdayaan perempuan dalam hal ekonomi.
2. Manfaat penelitian bagi penulis :
Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah untuk dipergunakan dalam penelitian,

Sebagai ajang untuk mengasah kemampuan diri dalam menganalisa permasalahan dan fenomena sosial di masyarakat.

3. Manfaat penelitian bagi peneliti :

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi dan meningkatkan pengembangan perekonomiannya.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan diatas, banyak pembahasan yang diketahui terkait dengan upaya Dinas Sosial Kota Batu dalam menurunkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi Di Kota Batu. Insiden kemiskinan baik secara relatif atau absolut adalah tinggi di kalangan wanita terutama bagi wanita yang menjadi kepala rumah tangga. Bahkan disimpulkan bahwa kemiskinan perempuan lebih besar jika didistribusikan menurut kategori dari menikah menjadi tidak menikah dari pada didistribusikan menurut jenis kelamin. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan bagi wanita yang bercerai hidup atau mati, mereka bisa saja menjadi miskin karena mereka lebih miskin dari sebelumnya (pada saat masih memiliki suami) jika terpaksa menanggung anak dan nafkah atau harta yang ditinggalkan. Faktor kedua yang menyebabkan perempuan menjadi WRSE di Kota Batu ini adalah tingkat pendidikan mereka.

Dengan hal ini pemerintah Kota Batu memberi bantuan kepada mereka. Upaya yang diberikan Dinas Sosial Kota Batu dalam menurunkan masalah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) dengan cara membantu perekonomian tambahan. Memberikan perekonomian tambahan disini yang dimaksud yaitu dengan memberikan bekal kepada mereka. Pelatihan yang diberikan merupakan program dinas sosial untuk memberdayakan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) agar memiliki keahlian untuk mampu membuka usaha sendiri dan hidup mandiri. Pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan membuat kue, pelatihan memasak, pelatihan menjahit, dan memberikan bantuan rombongan multiguna.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena ketidakadilan yang bersifat multidimensi baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Oleh sebab itu,

untuk mengatasi kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh yakni melalui program pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk merumuskan rekomendasi mengentaskan WRSE dari kemiskinan tidaklah mudah karena perlu dipahami bahwa mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah wanita miskin tidak dapat dicapai hanya dengan program yang berorientasi peningkatan ekonomi semata. Beban ganda perempuan yang harus mengurus rumah, merawat anggota keluarganya membuat perempuan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan aktifitas produktif apalagi mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dari pembahasan mengenai faktor penghambat program pengentasan kemiskinan bagi WRSE dapat disimpulkan bahwa pemberian modal usaha dan program pelatihan keterampilan ternyata tidak cukup. Terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir WRSE, sebagian besar WRSE di desa ini menginginkan bantuan dan dukungan untuk meringankan kehidupan mereka sebagai strategi mengentaskan mereka dari kemiskinan.

B. Saran

Dari penelitian yang saya lakukan dengan narasumber dari pihak pemerintah Dinas Kota Batu dan beberapa wanita rawan sosial ekonomi di Kecamatan Junrejo Kota Batu yang termasuk dalam data wanita rawan sosial ekonomi. Pemerintah seharusnya selalu rutin dalam memberikan pelatihan dan memberikan bantuan kepada wanita rawan sosial ekonomi, karena jika pemberian bantuan tidak rutin akan bisa jadi terjadi penambahan kembali jumlah wanita rawan sosial ekonomi di Kota Batu. Mensurvei satu persatu apakah bantuan yang diberikan kepada wanita rawan sosial ekonomi digunakan dengan benar-benar atau tidak, karena takutnya terjadi penyelewangan bantuan yang sudah diberikan.

Rekomendasi upaya untuk WRSE adalah dengan telah banyak dilakukan program dan proyek yang berusaha "memerangi" dilakukan kemiskinan, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Namun belum juga membuahkan hasil yang diharapkan.

Permasalahan tersebut muncul karena minimnya pendekatan yang

melibatkan kaum miskin dalam proses perencanaan program

maupun dalam pelaksanaannya. Orang

miskin dianggap tidak memiliki potensi dan kekuatan sehingga mereka dianggap sebagai

objek. Pendekatan ini secara tidak langsung memperparah kondisi orang miskin,

karena mengakibatkan ketergantungan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abdul Wahhab Solichin. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara)

Afifudin dan Ahmad Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia)

Buku *Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Batu*

Buku *RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah Kota Batu)*

Buku *Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Batu*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)

Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama)

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*. (Malang : Intrans

Publishing).

Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. (Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group).

Hurlock, Elizabeth B. (2011). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang*

Jum Anggriani. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. (Edisi Pertama Yogyakarta Graha Ilmu)

Moelong, L. (2015). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Ngajenan. (1990). *Kamus Etismologi Bahasa Indonesia*, (Semarang : Dahara Prize).

Rentang Kehidupan. (Jakarta : Penerbit Erlangga).

Safroni, Drs .K.H.M.Ladzi. (2012). *Manajemendan Reformasipelayanan publik*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Susilo Dwi, Rachmad K. (2012). *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Perspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)

Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama).

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta)

Schuler, Hashemi dan Riley. *Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat*.

Tantan Hermansyah. (2016).
Memperdayakan Masyarakat dengan Mengaplikasikan Pendekatan Transformasi Komunitas Instisusional, (Banten: UIN Jakarta Press)

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991 : 1109)

Sumber Jurnal

Hayat (2014).
Jurnal Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara.
Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Vol. 8: No.1.

Hayat (2014). *Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan*

Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Jurnal Bina Praja. Vol 6 No. 2

Muhammad Ama Ridlwan, Slamet Muchsindan Hayat, (2017). *Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal.*

Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review. Vol 2, No. 2.

Hayat, Slamet Hidayat Turohmandan Yaqub Cikusin, (2018). *Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.*

Jurnal Transformasi Administrasi. Vol 8, No. 2.

Hayat, (2020). *Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik.* Jurnal Astro (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08: No.1.

Hayat, Umi Kalsum, Nurul umiati, (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang).* Universitas Islam Malang, Umika Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 Vol. 14 No. 4.

Naufalmuhammad38.blogspot.com/2017/03/profil-kota-batu.html

Sumber Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Batu, Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Perturan Walikota Batu nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kota Batu

Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial